

BAB I

PENDAHULUAN

Penulis memilih judul “ *Reaksi Korea Utara Terhadap Kebijakan Pemerintah Lee Myung Bak (study kasus: Kompensasi perlucutan program dan bahan nuklir Korea Utara dengan Bantuan Ekonomi Korea Selatan)*” sebagai judul skripsi berdasarkan beberapa alasan. Pertama, penulis tertarik dengan topik hubungan Korea Utara dan Korea Selatan pasca terpilihnya Lee Myung Bak. Terpilihnya Lee Myung Bak sebagai presiden merupakan era baru bagi hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Kebijakan yang keras dari pemerintah Lee Myung Bak telah menimbulkan reaksi-reaksi yang keras dari Korea Utara. Kedua, judul tersebut belum pernah diangkat sebagai judul skripsi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketiga, dari segi teknis, penulis telah berhasil mengumpulkan data-data yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

A. Latar Belakang Masalah

Korea atau *Choson* dalam bahasa Korea adalah sebuah wilayah semenanjung di Asia Timur yang terpecah menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Cina di barat laut, Uni Soviet di timur laut, Selat Korea di selatan, Laut Jepang di timur dan Laut Kuning di barat. Pada tahun 1988, jumlah penduduknya tercatat 63,5 juta, dua pertiga diantaranya tinggal di Korea Selatan. Setelah Perang Dunia II, wilayah

ini terbagi menjadi dua. Garis lintang 38 derajat menjadi pemisah Korea Utara dan Korea Selatan¹.

Seperti yang diketahui melalui catatan sejarah, sekalipun merupakan negara merdeka, Korea mengakui Cina sebagai pelindungnya. Akibatnya, ketika Jepang menyerbu Korea pada 1593, tentara Jepang dapat dikalahkan berkat bantuan Cina. Sejak awal abad ke 16, Korea menjadi negara tertutup yang memutuskan hubungan dengan negara luar. Namun, pada abad ke 17 ketika orang Manchu mengalahkan Dinasti Ming dan membentuk Dinasti baru, Korea dipaksa memberikan Upeti kepada Pemerintah Cina yang baru. Sejak itu seluruh Korea menjadi ajang persengketaan antara Cina dan Jepang. Setelah perang antara Cina dan Jepang pada tahun 1894-1895, Jepang semakin meningkatkan pengaruhnya di Korea dan pada tahun 1910 merebut seluruh semenanjung. Dalam masa penjajahan ini seluruh sumber daya Korea dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang.

Tahun 1945, setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuh bom atom oleh Amerika Serikat. Jepang mengakui kekalahannya, menyusul kepergian pasukan Jepang, ribuan tentara Amerika merapat di pantai timur di selatan Korea. Amerika Serikat ingin menjadi penguasa baru di Semenanjung Korea, sebelum Uni Soviet mendahului masuk Korea. Dibawah penguasaan pemerintah militer Amerika Serikat, negara dan bangsa Korea tetap berusaha untuk menjadi negara dan bangsa yang bersatu meskipun tanah air Korea telah dibagi dua akibat dari Perang Dunia II. Pada saat itu, belahan utara

¹ Sugihastuti. *Beautiful E-mail from Korea*. Yogyakarta, Carasvatilbooks 2008, hal 14

Semenanjung Korea mulai melaksanakan pemerintahan militer di bawah Uni Soviet².

Pada 1948 Amerika Serikat menarik diri dari wilayah yang didudukinya di selatan dan meninggalkan sekelompok kecil penasihat militer. Pada tanggal 15 Agustus 1948 dibentuk Republik Korea Selatan. Uni Soviet juga menarik diri dari Korea Utara untuk membentuk Republik Demokratik Rakyat Korea pada 1 Mei 1948.³ Korea Utara menandatangani sejumlah persetujuan dengan Uni Soviet untuk mendapat bantuan militer, ekonomi dan teknologi. Korea Utara juga menjalin hubungan diplomatik dengan China.

Runtuhnya Uni Soviet yang menyusul keruntuhan blok Eropa Timur mempercepat dunia Internasional masuk dalam suasana berakhirnya persaingan perang dingin. Setelah berakhirnya perang Dingin semua negara mulai mengutamakan urusan perekonomian dari pada ideologi nasionalnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa negara-negara sahabat Korea Utara tidak berdaya dalam memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Utara. Berhentinya pemberian bantuan dari sekutunya telah menyebabkan Korea Utara mengalami 4 kekurangan yang sangat serius yaitu kekurangan valuta asing, bahan mentah untuk industri, tenaga listrik dan bahan makanan.⁴

Sejak kepemimpinan Kim Jong Il yang menggantikan Kim Il Sung, regime di Korea Utara tidak stabil seperti dahulu yang diakibatkan oleh semakin melebarnya kesenjangan antara mereka yang kaya dan yang miskin,

² Ibid hal 15

³ Ibid

⁴ Yang Seung Yoon dan Mohtar Mas'ood, "*Politik Luar Negeri Korea Selatan*" "Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2004. hal 16

kontrol sosial menjadi mengendur karena para pemimpin mementingkan kekayaan/uang, kondisi moral serta disiplin anggota militer yang semakin mundur. Akibatnya keadaan ekonomi Korea Utara mengalami stagnasi dan kekurangan makanan dan energi, yang mengakibatkan terjadinya kelaparan dan semakin mempengaruhi kondisi moral bangsa⁵.

Walaupun kondisi ekonomi Korea Utara sangat memprihatinkan dan bergantung dari bantuan pihak luar, Korea Utara masih tetap memprioritaskan kebijakan meningkatkan kemampuan militer untuk menghadapi kemungkinan ancaman. Bagi Korea Utara, militer memiliki kedudukan dan status sosial tinggi yang sangat dihormati di masyarakat Korea Utara.

Sejak tahun 1980-an, Korea Utara memproduksi rudal jarak menengah yang diekspor ke Timur Tengah. Tahun 1990-an telah berhasil memproduksi rudal balistik dengan jarak tempuh yang lebih jauh dari type Nodong.⁶ Sikap Korea Utara yang tertutup terhadap dunia luar membuat kesulitan untuk mengetahui kapasitas dan keakuratan rudal balistik tersebut, hal ini membuat kekhawatiran dari negara-negara Asia Timur karena sewaktu-waktu Korea Utara bisa melakukan uji coba Rudal yang melewati negara-negara di Asia Timur.

Tahun 2003, Korea Utara menyatakan untuk mengundurkan diri dari Treaty Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), kemudian mengembangkan senjata nuklir di Yongbyon yang terletak disebelah utara

⁵ Abdul irsan. *Budaya dan perilaku politik Jepang di Asia*. Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta selatan. hal 171

⁶ Ibid 170

Pyongyang. Untuk membahas masalah nuklir Korea Utara, dilangsungkan pertemuan G-6 yang terdiri atas Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Cina yang telah berlangsung lima kali pertemuan (Agustus 2003), tetapi belum menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Sikap Korea Utara yang sulit diajak berunding mengakibatkan perundingan G-6 belum menghasilkan kesepakatan. Tahun 2006, Korea Utara telah berhasil melakukan percobaan meledakan bom nuklir dibawah tanah, akibatnya Korea Utara mendapatkan sanksi ekonomi dari PBB yang diikuti oleh Amerika Serikat dan Jepang.

Sebagai negara yang dekat secara geografis, program nuklir Korea Utara merupakan ancaman bagi keamanan di Korea Selatan. Korea Selatan berupaya meningkatkan kemampuan/kesiagaan militernya guna menghadapi kemungkinan serangan nuklir Korea Utara⁷. Angkatan bersenjata Korea Selatan memiliki 22 divisi angkatan darat dan 3 divisi marinir, seluruhnya berjumlah 690.000 pasukan. Angkatan laut terbagi dalam tiga gugus armada dengan 180 kapal, total bobot sekitar 136.000 ton; dan angkatan udara berkekuatan 600 pesawat terbang tempur termasuk F-16.⁸

Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun menegaskan program senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia, namun dalam kebijakan luar negerinya tetap berusaha untuk melakukan *engagement* terhadap Korea Utara.⁹ Melalui kebijakan perdamaian dan kesejahteraan yang merupakan kelanjutan dari kebijakan sinar matahari

⁷ <http://www.bisnis.com>. Di akses 1 November 2008.

⁸ Abdul irsan.op.cit., hal 174-175

⁹ <http://www.indonesianmission-eu.org>. Di akses 1 November 2008

presiden Kim Dae Jung, hubungan dengan Korea Utara akan dilaksanakan melalui dialog dan bantuan ekonomi. Uji coba nuklir Korea Utara tidak mengubah sikap presiden Korea Selatan terhadap Pyongyang, Roh Moo-hyun terus memberikan bantuan-bantuan tanpa syarat dan memisahkan dengan permasalahan krisis nuklir Korea Utara.

Hubungan kedua Korea yang mulai membaik kembali memanas semenjak diangkatnya Presiden Lee Myung Bak. Lee Myung Bak memiliki pandangan dan sikap politik yang berbeda dari para pendahulunya dalam menilai dan menyikapi Korea Utara. Dalam pemerintahannya, Lee Myung Bak menerapkan kebijakan bebas nuklir dan pintu terbuka 3000 terhadap Korea Utara yang berdasarkan pada hubungan timbal balik.

Di bawah kebijakan baru, Korea Selatan akan menyediakan bantuan ekonomi bagi Korea Utara selama 1 dasawarsa untuk membantu meningkatkan pendapatan perkapita Korea Utara hingga 3000 dolar, namun dengan syarat Korea Utara harus melumpuhkan semua program nuklirnya.¹⁰ Dalam pandangan Lee Myung Bak, dengan mengambil sikap tegas terhadap Korea Utara merupakan kunci untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah: **“Bagaimana Reaksi Korea Utara**

¹⁰ http://rki.kbs.co.kr/indonesian/news/news_issue_detail. Diakses 12 Desember 2008.

terhadap kebijakan pemerintah Lee Myung Bak mengenai perlucutan program dan bahan nuklir Korea Utara sebagai imbalan bantuan ekonomi Korea Selatan”?

C. Kerangka Dasar Teori

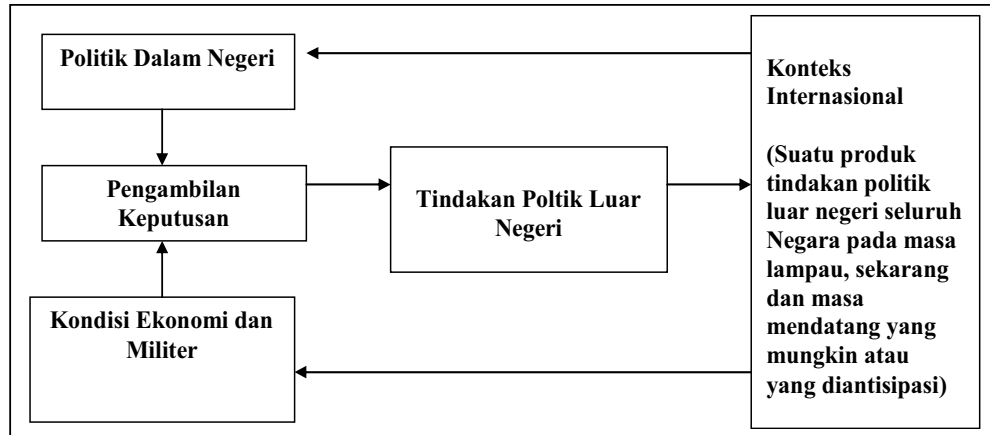
Untuk menjawab Rumusan Permasalahan diatas akan digunakan Teori Pengambilan Keputusan. Kerangka pemikiran ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang reaksi Korea Utara terhadap kebijakan pemerintah Lee Myung Bak atas kompensasi perlucutan program dan bahan nuklir Korea Utara dengan bantuan ekonomi Korea Selatan.

1. Teori pengambilan keputusan (*Decision Making Theory*)

Menurut William D. Coplin pengambilan keputusan adalah orang-orang yang memegang peran penting dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab resmi dan pengaruh actual dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut keterlibatan negaranya dalam pergaulan dunia. Dalam menentukan tindakan politik luar negerinya merupakan akibat dari tiga konsederasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri; kedua kemampuan ekonomi dan militer dan yang ketiga, konteks internasional. Gambar di bawah ini mengilustrasikan bagaimana

faktor-faktor tadi yang disebutkan berinteraksi untuk menghasilkan tindakan politik luar negeri.¹¹

Gambar 1. Proses pengambilan keputusan menurut William D. Coplin



William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis.

a. Kondisi politik dalam negeri

Keputusan Korea Utara untuk menolak kebijakan Korea Selatan dipengaruhi oleh situasi politik (*domestic politic*) dalam negeri yang berperan penting dalam pembuatan keputusan. Kebijakan Korea Selatan yang mengaitkan bantuan ekonomi dengan perlucutan senjata nuklir Korea Utara telah menimbulkan berbagai tuntutan dari pihak Pyongyang. Tuntutan yang berupa kecaman tersebut datang dari partai buruh Korea Utara yang merupakan partai yang berkuasa di Korea Utara. Serangan verbal terus dilontarkan oleh pihak Pyongyang melalui surat kabar Rodong sinmun yang

¹¹ William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional Suara Telaah Teoritis, (terj), Sinar Baru, Bandung, 2003, hal 30.

merupakan organ resmi Partai Buruh Korea Utara. Menurutnya kebijakan Korea Selatan adalah sebagai isyarat deklarasi perang.

b. Decision maker.

Dalam politik internasional, meski negara sebagai aktor pelaku, namun manusia dengan peran sebagai pembuat keputusan melakukan aksi dan reaksi. Manusia bukan satuan yang abstrak yang biasa disebut negara, ia menetapkan dan memainkan konsep kepentingan nasional, merencanakan strategi, memaknakan issue, membuat keputusan untuk bertindak serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan. Pembuatan keputusan di dalam politik luar negeri sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu bangsa. Pada kebanyakan negara, pimpinan pemerintah (presiden, perdana menteri ataupun raja) memainkan peran sebagai pembuat keputusan suatu negara.¹²

Keputusan Korea Utara dalam memberikan reaksi keras terhadap kebijakan Korea Selatan tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya adalah faktor *decision maker* atau pembuat keputusan itu sendiri. Ada beberapa unsur yang bergerak sebagai decision maker sehingga reaksi keras Korea Utara dapat dilakukan. Dalam hal ini pihak militer Korea Utara Letnan Jenderal Kim Yong-Chol yang merupakan wakil ketua Komisi Pertahanan Nasional melalui Korean people's Army (KPA) yang langsung melakukan tindakan sebagai reaksi atas kebijakan Korea Selatan.

¹² Jack C. Plano & Roy Olton, "Kamus Hubungan Internasional", terjem. Wawan Juanda, Putra A Bardin, 1994, hal.4

c. Kondisi ekonomi dan militer

Kondisi perekonomian Korea Utara yang kurang baik telah menjadikan rakyatnya menderita dan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ditengah menghadapi kesulitan ekonomi, pemerintah Korea Utara menerapkan filosofi *Juche* yaitu percaya pada diri sendiri yang akibatnya Korea Utara mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Sistem ekonomi dan politik dikontrol ketat. Pada pertengahan tahun 1990-an, sekitar 2 juta orang mati kelaparan di tambah dengan datangnya bencana alam. Anak-anak, perempuan hamil, dan penduduk berusia lanjut adalah kelompok yang paling menderita karena kekurangan makanan. Statistik pemerintah menunjukkan 45 % balita mengalami kekurangan gizi. Ironisnya, penguasa Korea Utara lebih memprioritaskan dana untuk program persenjataan, termasuk proyek senjata nuklirnya ketimbang untuk melepaskan rakyatnya dari kelaparan.

Total pendapatan GNP (*Gross National Product*) Korea Utara pada tahun 2006 sebesar US\$ 25,6 miliar dan pendapatan perkapitanya US\$ 1108. Pendapatan GNP diperoleh dari: 23,3% di sektor pertanian dan perikanan, pertambangan di 10,2%, 19,5% di manufaktur, 4,5% pada listrik, gas dan air ledeng, konstruksi 9,0%, dan 33,6% pada layanan jasa.¹³ Dalam keterbatasan kemampuan ekonomi, Korea Utara bergantung pada bantuan luar negeri sejak pertengahan 1990-an. Ketergantungan tersebut terjadi karena bencana alam yang terus melanda Korea Utara. Disusul sanksi ekonomi yang dijatuhkan DK PBB terhadap Korea Utara akibat uji coba nuklir tahun 2006

¹³ <http://www.traveldocs.com/kp/economy.htm>, diakses 13 April 2009

semakin membuat perekonomian Korea Utara semakin terperosok dalam kehancuran ekonomi.

Korea Selatan merupakan negara yang rutin memberikan bantuan kepada Korea Utara. Tercatat bahwa Korea Selatan sering mengirim bantuan berupa pangan sebanyak 400.000 ton beras serta 300.000 ton pupuk bagi Korea Utara setiap tahunnya dalam bentuk pinjaman.¹⁴ Jumlah yang sangat berarti bagi perekonomian Korea Utara, bantuan tersebut diberikan dengan harapan agar pemerintah Korea Utara mampu mengatasi kelaparan yang melanda warganya. Korea Selatan menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi Korea Utara setelah Cina. Ekonomi Korea Utara semakin menjadi bergantung pada Korea Selatan.

Sejak Lee Myung Bak menjadi presiden yang menerapkan kebijakan yang mengaitkan bantuan ekonomi dengan denuklirisasi telah menjadikan perekonomian Korea Utara mengalami penurunan akibat kurangnya bantuan dari Korea Selatan. Korea Utara dengan ekonomi diperkirakan 20 miliar dolar setahun akan kehilangan paling tidak satu miliar dalam bantuan yang diberikan Korea Selatan setiap tahunnya.¹⁵ Kondisi perekonomian Korea Utara yang lemah telah dijadikan senjata oleh Lee Myung Bak untuk menekan Korea Utara untuk mau melakukan denuklirisasi.

Dari segi militer, Korea Utara memiliki kemampuan militer yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Korea Utara mempunyai kekuatan militer sebesar 1.111.000 personil dengan perincian 1.000.000

¹⁴ [http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjQ1NDY=jagat 24 jam](http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjQ1NDY=jagat%20jam), diakses 13 April 2009

¹⁵ http://analisadaily.com/?option=com_content&view=article&id=1822, diakses 10 Februari 2009

Angkatan Darat, 40.000 Angkatan Laut dan 70.000 Angkatan Udara. Kekuatan darat tersebut disusun dalam 60 divisi/brigade infantri, 25 brigade infantri mekanik, 13 brigade tank, 24 brigade khusus dan 30 brigade artileri. Persenjataan Angkatan Darat terdiri 10.300 artileri, 3.500 tank, 5.800 artileri anti serangan udara. Sementara Angkatan Laut Korea Utara terdiri dari 445 kapal perang (Fregat, PSK, MTB), 22 kapal selam, 310 kapal bantu, dan lebih dari 100 hovercraft. Kekuatan Angkatan Udara terdiri dari 850 pesawat tempur taktis, 480 pesawat pendukung, serta 290 helikopter. Korea Utara memiliki sekitar 5,5 juta pasukan cadangan dan 100.000 pasukan khusus.¹⁶

Sedangkan Korea Selatan memiliki kekuatan total militer yang aktif adalah 687.700 yang terdiri dari angkatan darat, 560 ribu angkatan laut 63 ribu dan angkatan udara 64.700. Kekuatan total cadangan sekitar 4.5 juta. Kira-kira 37 ribu tentara Amerika juga berpangkalan di negara ini.¹⁷ Korea Utara yang memiliki kemampuan militer lebih besar dua kali lipat bila dibandingkan dengan Korea Selatan merasa mampu untuk memberikan reaksi-reaksi menentang kebijakan Korea Selatan. Reaksi keras berupa penutupan perbatasan dan peluncuran rudal dilakukan piha militer untuk menyampaikan rasa tidak senangnya dengan kebijakan Korea Selatan sekaligus menginginkan agar Korea Selatan mengubah kebijakan terhadap Pyongyang.

¹⁶ http://www.lesperssi.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=10, pdf, diakses 13 April 2009

¹⁷ <http://yulikorsel.wordpress.com/2008/03/24/kekuatan-militer-korea-selatan/>. Diakses 13 April 2009

d. Lingkungan Internasional

Kondisi internasional turut berperan dalam mempengaruhi para pengambil keputusan. Lee Myung Bak dalam menerapkan kebijakan yang keras terhadap Pyongyang telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh George W Bush yang menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong Lee Myung Bak bertindak pragmatis terhadap Korea Utara lewat politik ekonomi. Untuk itu, Korea Utara mengambil keputusan untuk menutup perbatasan dan peluncuran rudal adalah sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Korea Selatan yang telah mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat yang merupakan negara yang paling bersemangat untuk melucuti senjata nuklirnya.

D. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, penulis dapat mengambil suatu hipotesa bahwa militer Korea Utara menolak kebijakan Korea Selatan dengan memunculkan reaksi-reaksi sebagai berikut:

1. Militer Korea Utara menutup perbatasan berupa penutupan jalur darat yang menghubungkan Korea Utara ke Korea Selatan.
2. Militer Korea Utara mengadakan peluncuran jarak dekat untuk menggertak Korea Selatan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Deduktif, yaitu dengan berdasarkan teori, kemudian ditarik hipotesa yang akan dibuktikan dengan data empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka dan internet. Oleh karena itu data yang diperoleh adalah data sekunder yang bersumber dari literatur berbagai buku, surat kabar, internet dan sumber-sumber lain yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori yang digunakan.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka diberi batasan jangkauan. Jangkauan penelitian ini dititikberatkan pada reaksi Korea Utara terhadap kebijakan Lee Myung Bak mengenai kompensasi bantuan ekonomi dengan program dan bahan nuklir. Penulisan ini mengambil waktu dari tahun 2008, masa diangkatnya Lee Myung Bak sebagai presiden Korea Selatan sampai sekarang. Namun demikian tidak menutup kemungkinan penggunaan data-data yang relevan dalam masa-masa yang lain sejauh data tersebut mendukung penulisan.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan, yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika Penulisan.
- BAB II : Menjelaskan hubungan luar negeri Korea Utara dengan Korea Selatan
- BAB III : Menjelaskan perubahan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara.
- BAB IV : Menjelaskan bentuk-bentuk reaksi Korea Utara terhadap kebijakan Lee Myung Bak atas Kompensasi perlucutan program dan bahan nuklir Korea Utara dengan bantuan ekonomi Korea Selatan.
- BAB V : Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.